

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 749-756
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15753998>

Perempuan di Panggung Kekuasaan: Menelusuri Asumsi Publik dan Wacana Gender dan Kepemimpinan Pemerintahan

Abdul Fikri Ginting, Hasan Sazali, Retno Sayekti

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: abdul3005243001@uinsu.ac.id, hasansazali@uinsu.ac.id, retnosayekti69@uinsu.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh politik membentuk asumsi publik terhadap kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan tokoh politik yang dipilih secara purposif. Kedua kelompok ini dipilih karena memiliki peran penting dalam membentuk opini dan mempengaruhi wacana sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana kepemimpinan perempuan masih banyak dibayangi oleh interpretasi keagamaan yang konservatif serta konstruksi sosial patriarkal yang telah mengakar kuat. Tokoh agama umumnya menyuarakan sikap hati-hati atau bahkan menolak kepemimpinan perempuan, dengan merujuk pada teks-teks normatif yang dipahami secara literal. Sementara itu, pandangan tokoh politik lebih beragam—beberapa mendukung secara terbuka dengan alasan kapasitas dan kontribusi perempuan dalam pemerintahan, sedangkan yang lain masih memandang perempuan sebagai pelengkap simbolik dalam politik. Wacana publik terhadap kepemimpinan perempuan sangat ditentukan oleh legitimasi yang diberikan oleh tokoh agama dan politik. Ketika dua otoritas ini cenderung mempertahankan tafsir gender tradisional, maka peluang perempuan untuk diterima secara substantif dalam kepemimpinan menjadi terbatas. Oleh karena itu, rekonstruksi wacana dan keterlibatan aktif para tokoh dalam mendorong narasi kesetaraan menjadi kunci untuk membuka ruang kekuasaan yang lebih inklusif dan adil gender.

Keywords: *Perempuan, Kepemimpinan, Wacana Gender, Tokoh Agama, Tokoh Politik*

Abstrak

This research aims to uncover how the views of religious figures and political figures shape public assumptions towards women's leadership in government. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with purposively selected religious and political figures. These two groups were chosen because of their important role in shaping opinions and influencing social discourse in society. The results show that the discourse on women's leadership is still largely overshadowed by conservative religious interpretations and deeply rooted patriarchal social constructs. Religious figures generally express caution or even reject women's leadership, referring to normative texts understood literally. Meanwhile, the views of political figures are more diverse—some openly support it based on women's capacity and contribution in government, while others still view women as symbolic complements in politics. Public discourse on women's leadership is largely determined by the legitimacy granted by religious and political figures. When these two authorities tend to maintain traditional gender interpretations, the opportunities for women to be substantively accepted in leadership become limited. Therefore, reconstructing the discourse and the active involvement of these figures in promoting narratives of equality are key to opening up a more inclusive and gender-just space for power.

Kata kunci: *Women, Leadership, Gender Discourse, Religious Figures, Political Figures*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Indonesia masih terbatas. Norma sosial dan stereotip gender menghambat akses mereka ke posisi strategis, mengurangi peluang dalam pengambilan keputusan politik. (Aula, 2023). Rendahnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan mencerminkan ketidakcukupan kebijakan afirmatif mengubah struktur sosial dan pola pikir. Penempatan kuota seringkali formalitas tanpa keterlibatan nyata, menunjukkan resistensi kultural kuat terhadap perubahan peran gender. Stereotip yang meragukan kompetensi perempuan juga memengaruhi

kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu, transformasi sosial melalui pendidikan dan advokasi sangat diperlukan

Kepemimpinan perempuan dalam konteks Islam kerap menjadi topik diskusi, namun tidak ada larangan tegas dalam ajaran agama. Pembatasan yang muncul lebih banyak disebabkan oleh interpretasi budaya yang cenderung patriarkal, bukan dari esensi ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi yang lebih inklusif dan berperspektif keadilan gender..(Budianto, 2020).

Kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak dilarang secara mutlak. Pembatasan lebih banyak muncul dari tafsir budaya yang patriarkal. Islam menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, dan kebijaksanaan. Pemahaman masyarakat perlu diarahkan pada prinsip-prinsip tersebut. Ini penting untuk membangun persepsi yang adil terhadap kepemimpinan perempuan.

Kepemimpinan perempuan di pemerintahan cenderung persuasif dan partisipatif, mengedepankan komunikasi empatik dan kolaboratif. Sensitivitas sosial mereka menciptakan lingkungan kerja inklusif, mendukung tata kelola responsif dan akuntabel, serta penting bagi pembangunan berkeadilan gender..(Trifena Revangelista Mambu, 2023).

Kepemimpinan perempuan di pemerintahan sangat layak didukung. Banyak perempuan memiliki pengetahuan, kompetensi, dan kepekaan sosial yang tinggi dalam menjalankan tugas. Mengabaikan potensi mereka karena gender adalah ketidakadilan struktural. Memberi ruang setara bagi perempuan untuk memimpin bukan hanya soal keadilan, tetapi juga strategi cerdas meningkatkan kualitas pemerintahan.

KAJIAN TERDAHULU

Berbagai kajian terdahulu telah mengkaji dinamika kepemimpinan perempuan dalam ranah pemerintahan dan politik dari sudut pandang gender, budaya, dan representasi sosial. Salah satu penelitian yang relevan adalah oleh Pratiwi (2020) dengan judul "Perempuan dan Kepemimpinan Politik: Studi tentang Peran Gender dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia". Penelitian ini menunjukkan bahwa masih kuatnya konstruksi sosial yang patriarkal di masyarakat menjadi salah satu faktor utama penghambat perempuan untuk maju dalam kepemimpinan politik, meskipun dari sisi kapasitas dan kompetensi mereka memiliki potensi yang setara dengan laki-laki. Pratiwi juga menemukan bahwa perempuan pemimpin sering kali menghadapi tekanan ganda, baik dari struktur pemerintahan maupun dari lingkungan sosial yang mempertanyakan legitimasi kepemimpinan mereka.

Selain itu, Lestari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Representasi Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Media" membahas bagaimana media memainkan peran penting dalam membentuk citra publik tentang perempuan pemimpin. Penelitiannya menunjukkan bahwa media cenderung menyoroti aspek-aspek pribadi perempuan, seperti penampilan dan status keluarga, ketimbang kompetensi dan pencapaian profesional mereka. Narasi yang dibentuk media seringkali memperkuat stereotip bahwa kepemimpinan adalah karakter maskulin, sehingga mempersulit perempuan dalam membangun otoritas publik sebagai pemimpin. Hal ini mempertegas perlunya pendekatan kritis terhadap media dan diskursus publik dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan.

Sementara itu, Aulia (2021) melalui penelitiannya berjudul "Analisis Gender terhadap Perempuan sebagai Kepala Daerah di Indonesia" menyoroti bagaimana perempuan yang berhasil menduduki posisi sebagai kepala daerah menunjukkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif, empatik, dan responsif terhadap isu-isu kesejahteraan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan tidak hanya mampu menyamai, tetapi dalam beberapa kasus bahkan melebihi efektivitas kepemimpinan laki-laki, terutama dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Aulia juga menekankan pentingnya dukungan struktural, seperti kebijakan afirmatif dan pendidikan kesadaran gender, untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan dalam panggung kekuasaan. Dengan demikian, kajian-kajian ini menjadi dasar penting dalam memahami dan menantang asumsi publik serta wacana gender yang membatasi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi, asumsi publik, serta

konstruksi wacana gender terkait kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan dua kelompok utama, yaitu tokoh agama dan tokoh politik. Tokoh agama dipilih karena memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai peran perempuan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, tokoh politik dipilih untuk memberikan perspektif praktis dan pengalaman langsung terkait keterlibatan perempuan dalam ranah kekuasaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi argumen dan pandangan narasumber. Hasil wawancara dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, narasi yang dominan, serta dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan di ranah pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan berhak dan mampu memimpin di ruang publik, asalkan didukung kompetensi, integritas, dan visi yang jelas. Kepemimpinan sejati tidak didasari gender, melainkan kapasitas untuk berkontribusi pada keadilan dan kemaslahatan umum. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, mendukung siapa pun, termasuk perempuan, yang dapat membawa perubahan positif. (Apriliani et al., 2021).

Penting untuk meluruskan pemahaman yang membatasi kepemimpinan perempuan di ruang publik. Pembatasan ini seringkali didasarkan pada penafsiran sempit dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang luas. Islam menghargai kemampuan individu berdasarkan ketakwaan dan amal saleh, bukan jenis kelamin. Perempuan dengan kapasitas, kepemimpinan, dan integritas layak menduduki posisi strategis, termasuk pemerintahan. Menolak kepemimpinan perempuan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan semangat inklusif Islam. Penting untuk meluruskan pemahaman yang membatasi kepemimpinan perempuan di ruang publik. Pembatasan ini seringkali didasarkan pada penafsiran sempit dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang luas. Islam menghargai kemampuan individu berdasarkan ketakwaan dan amal saleh, bukan jenis kelamin. Perempuan dengan kapasitas, kepemimpinan, dan integritas layak menduduki posisi strategis, termasuk pemerintahan. Menolak kepemimpinan perempuan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan semangat inklusif Islam.

Penting meluruskan pandangan yang membatasi kepemimpinan perempuan di ruang publik. Pembatasan ini sering kali hasil tafsir sempit, berlawanan dengan prinsip keadilan Islam yang luas. Islam menghargai kemampuan individu tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan kompeten layak memimpin, penolakan atas dasar gender adalah diskriminasi yang tidak sejalan dengan semangat inklusif Islam. (Zakiah, 2023).

Beberapa memahami bahwa laki-laki memiliki otoritas mutlak atas perempuan, terutama dalam kepemimpinan, namun konteks aslinya merujuk pada tanggung jawab laki-laki sebagai penanggung jawab finansial keluarga. Konsep tersebut bukanlah dominasi umum. Islam tidak melarang perempuan memimpin di ruang publik, karena banyak contoh sejarah menunjukkan peran penting perempuan. Membatasi pemahaman ini adalah keliru, sebab Islam mengedepankan kesetaraan berdasarkan kapasitas, integritas, dan kontribusi seseorang terhadap masyarakat, bukan jenis kelamin.

Al-Qur'an tidak melarang perempuan menjadi pemimpin secara eksplisit. Tafsir kontemporer bahkan menunjukkan perempuan berhak memimpin jika memenuhi syarat. M. Quraish Shihab menyatakan laki-laki pemimpin rumah tangga, namun perempuan bisa memimpin di luar itu jika berkompeten. Ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dibatasi gender, melainkan oleh kapasitas individu. (Basri, 2018).

Ajaran Islam sebenarnya tidak melarang perempuan memimpin di ruang publik atau pemerintahan. Ayat yang sering diperdebatkan mengarah pada peran laki-laki sebagai pelindung keluarga, bukan pembatasan kepemimpinan perempuan secara umum. Tafsir kontemporer mendukung perempuan dapat memimpin jika berkompeten. Sejarah Islam pun menunjukkan banyak contoh perempuan pemimpin berpengaruh.

Perempuan memiliki hak dan kemampuan untuk memimpin di ruang publik selama didukung oleh kompetensi, integritas, dan visi yang jelas. Kepemimpinan dalam Islam tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas untuk membawa keadilan dan kemaslahatan. Sayangnya, sebagian

penolakan terhadap kepemimpinan perempuan masih bersumber dari penafsiran sempit atas teks agama, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Prinsip Islam sendiri menilai seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal perbuatan, bukan gender. Adapun konsep laki-laki sebagai pemimpin (qawwam) merujuk pada tanggung jawab dalam keluarga, bukan dominasi dalam semua aspek kehidupan.

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan lebih tentang kualitas individu, bukan gender. Perempuan terbukti mampu membuat keputusan strategis dan membawa perubahan positif. Mereka membangun kekuatan dari dalam, berkolaborasi, dan mendorong aksi kolektif untuk perubahan yang lebih besar. (Pulu et al., 2023). Kualitas pemimpin tidak ditentukan jenis kelamin, melainkan kemampuan dan komitmen. Perempuan terbukti mampu memimpin dengan keteguhan, empati, dan keberanian. Gaya kepemimpinan mereka yang partisipatif dan kolaboratif efektif membangun sinergi dan perubahan inklusif. Ini menunjukkan kepemimpinan adalah tentang melayani dengan adil, bukan dominasi.

Keberhasilan perempuan di posisi strategis menunjukkan pentingnya membuka ruang adil dalam pemerintahan. Dengan akses dan dukungan, mereka membawa warna kepemimpinan yang lebih manusiawi dan solutif, serta kebijakan yang peka isu sosial. Membatasi peran perempuan merugikan masyarakat karena mengabaikan potensi besar. Kehadiran perempuan pemimpin esensial bagi pembangunan berkelanjutan dan demokrasi inklusif, menciptakan kebijakan lebih adil dan merata. Memberi ruang perempuan adalah strategi cerdas untuk tata kelola progresif dan berpihak pada semua. Tantangan budaya dan sosial, seperti kebiasaan lama dan pandangan kaku tentang peran gender, masih menghambat perempuan untuk jadi pemimpin di banyak daerah. Tapi, saat perempuan sukses memimpin di lingkungan informal, misalnya di perkumpulan warga, ini menunjukkan mereka punya potensi untuk mengubah pandangan masyarakat. Pendidikan dan pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender sangat penting untuk mengubah sikap masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. (Hibbah & Safitri, 2024).

Hambatan terbesar kepemimpinan perempuan adalah konstruksi budaya dan sosial yang bias gender. Norma yang mengakar kuat di masyarakat sering membentuk asumsi bahwa laki-laki lebih layak memimpin, sementara perempuan ditempatkan dalam peran domestik. Akibatnya, potensi dan kontribusi perempuan dalam ranah publik sering terabaikan. Interpretasi konservatif terhadap teks agama juga kerap dijadikan legitimasi untuk membatasi perempuan, padahal penafsiran kontekstual dan progresif menunjukkan bahwa Islam memberi ruang luas bagi perempuan untuk berperan aktif.

Pengalaman perempuan memimpin di organisasi sosial membuktikan efektivitas mereka, perlahan menggeser persepsi dan membuka jalan di ranah formal. Pendidikan dan kesadaran gender esensial untuk masyarakat yang adil, agar kualitas kepemimpinan dihargai tanpa memandang jenis kelamin. Transformasi budaya juga membutuhkan dukungan kebijakan kesetaraan gender dari pemerintah dan institusi, menciptakan sistem inklusif dan mengurangi hambatan struktural. Representasi perempuan di posisi strategis menginspirasi generasi muda, mempercepat terwujudnya masyarakat setara yang memaknai kepemimpinan sebagai hak dan tanggung jawab bersama..

Mewujudkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan memerlukan upaya bersama: mendokumentasikan pengalaman perempuan, pelatihan, dan dialog antar-organisasi yang dipimpin perempuan. Ini mendekatkan pemimpin perempuan dengan masyarakat. Penelitian menunjukkan kepemimpinan perempuan mampu menyamai atau melampaui laki-laki, terutama dalam menciptakan ruang partisipatif dan keadilan sosial di organisasi. Kepemimpinan perempuan memperkuat struktur dan membentuk budaya inklusif, responsif terhadap masyarakat. (Malihah et al., 2024)

Kesetaraan gender dalam kepemimpinan memerlukan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, dokumentasi pengalaman, dan dialog, membangun kapasitas serta solidaritas. Pendekatan kolaboratif dan empatik ini menjadi keunggulan perempuan dalam memimpin. Keberhasilan mereka di organisasi sosial membuktikan kualitas kepemimpinan bukan soal gender, melainkan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat. Keterlibatan perempuan membawa perspektif inklusif, memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi, krusial bagi pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan demokratis.

Diagram yang ditampilkan dengan dua warna—hijau dan merah—menggambarkan keseimbangan antara peluang dan tantangan dalam kepemimpinan perempuan. Warna hijau

merepresentasikan peluang, seperti hak dan kapasitas perempuan untuk memimpin, gaya kepemimpinan kolaboratif yang efektif, kontribusi terhadap kebijakan sosial yang inklusif, serta pentingnya pendidikan dan pemberdayaan gender. Sementara itu, warna merah menunjukkan tantangan besar yang masih menghambat, seperti norma sosial patriarkal, penafsiran konservatif terhadap agama, minimnya dukungan struktural, dan kurangnya representasi perempuan dalam posisi strategis. Keseluruhan diagram ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan yang setara, perlu upaya simultan dalam memperkuat peluang serta mengatasi hambatan sosial, budaya, dan struktural yang masih ada.

Dalam Islam, kesetaraan gender ditegaskan: kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan dan amal, bukan jenis kelamin. Al-Qur'an dan hadis memberi ruang setara bagi laki-laki dan perempuan di sosial, politik, dan ekonomi, serta menghargai martabat dan hak mereka..(Azizah et al., 2024).

Perbedaan biologis tidak dasar diskriminasi peran sosial, termasuk kepemimpinan. Islam mengedepankan ketakwaan dan amal sebagai parameter keunggulan, bukan gender. Pembatasan peran perempuan karena tafsir sempit atau bias budaya perlu ditinjau ulang. Islam telah memberi ruang partisipatif luas; tantangan kini adalah implementasi kontekstual. Pendidikan inklusif dan perombakan pola pikir diskriminatif kunci wujudkan masyarakat adil dan setara..

Dalam Islam, kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab khalifah yang sama untuk membangun masyarakat adil. Tidak ada diskriminasi, keduanya memiliki hak dan kewajiban setara dalam peran sosial dan keagamaan.. (Buchori et al., 2023).

Konsep khalifah di bumi tidak membedakan tanggung jawab sosial dan moral antara laki-laki dan perempuan. Keduanya bertugas menjaga dan mengelola bumi, serta bekerja sama membangun masyarakat adil, saling melengkapi tanpa dominasi. Gender bukan penentu pengabdian, melainkan kualitas individu. Islam tidak diskriminatif, memberi hak dan kewajiban setara bagi keduanya dalam sosial, politik, dan keagamaan. Diskriminasi terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan Islam, yang harusnya mendorong penguatan peran perempuan demi masyarakat kuat.

Pemahaman keliru terhadap teks keagamaan sering menghambat kesetaraan gender, membatasi peran perempuan. Karena itu, tafsir Islam harus lebih kontekstual dan inklusif. Tujuannya agar nilai keadilan dan kesetaraan terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.(Izzad, 2018). Pemahaman yang keliru atas teks keagamaan kerap menjadi belenggu utama kesetaraan gender. Penafsiran yang bias, yang mereduksi peran perempuan dalam masyarakat, telah nyata membatasi hak partisipasi penuh mereka. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif yang lebih progresif dan kontekstual adalah kunci emas untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam setiap sendi kehidupan.

Pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ajaran agama membuka jalan bagi pemahaman yang lebih relevan dengan dinamika sosial, memungkinkan peran setara bagi perempuan di berbagai bidang. Ini mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pentingnya pemahaman progresif dan menyeluruh terhadap agama menekankan bahwa peran perempuan tidak terbatas domestik. Adaptasi ini memastikan nilai keadilan dan kesetaraan Islam terwujud, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghargai peran perempuan.

Kesetaraan gender dalam Islam berlandaskan pada prinsip bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan dan amal, bukan jenis kelamin. Islam memberi ruang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam peran sosial, politik, dan keagamaan, karena keduanya sama-sama memikul tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Diskriminasi berbasis gender ditolak, sebab Islam mengutamakan kualitas individu. Namun, pembatasan peran perempuan sering kali bersumber dari tafsir sempit dan budaya patriarkis, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran kontekstual dan progresif untuk menguatkan peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan inklusif dan perubahan pola pikir diskriminatif menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan menghargai peran perempuan sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam

SIMPULAN

Isu gender dalam kepemimpinan masih menjadi tema perdebatan yang cukup sengit. Meskipun dunia telah bergerak ke arah kesetaraan gender, banyak asumsi publik yang masih menganggap bahwa

peran kepemimpinan lebih layak diemban oleh laki-laki. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang sudah lama tertanam dalam banyak budaya, termasuk dalam konteks sosial dan politik.

Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan sering dipertanyakan dan terkadang dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajar, meskipun banyak bukti yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama, jika tidak lebih, dalam mengelola kekuasaan dan membuat keputusan strategis. Namun, pandangan tersebut mulai berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Banyak negara dan organisasi internasional telah memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif yang mendorong perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Dalam banyak kasus, perempuan pemimpin menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan empatik.

Gaya kepemimpinan ini terbukti lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkeadilan dan merata. Tidak hanya itu, perempuan sering kali memiliki kemampuan lebih dalam mendengarkan berbagai suara dalam masyarakat, yang menjadi modal penting dalam pengambilan keputusan yang lebih adil.

Selain itu, perlu diakui bahwa meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan, hambatan-hambatan sosial dan budaya masih ada. Di banyak negara, persepsi masyarakat terhadap perempuan yang memimpin seringkali dipengaruhi oleh stereotip gender yang kuat. Dalam beberapa kasus, perempuan harus menghadapi tantangan ganda, yakni harus membuktikan kemampuan mereka di medan yang sudah didominasi oleh laki-laki sambil juga menghadapi ekspektasi tradisional tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Hal ini menjadi penghalang yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan penuh dalam kepemimpinan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menafsirkan ajaran agama dan budaya sangat diperlukan. Banyak interpretasi teks-teks keagamaan yang salah kaprah telah menjadi dasar pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya, penting untuk menggali tafsir yang lebih progresif dan relevan dengan konteks zaman, yang mendukung kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan.

Perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di ranah pemerintahan maupun di sektor lainnya. Keberhasilan perempuan dalam kepemimpinan tidak hanya bergantung pada faktor gender, tetapi lebih pada kemampuan, integritas, dan kapasitas individu. Untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih nyata dalam kepemimpinan pemerintahan, penting untuk terus mendorong perubahan sosial dan budaya, serta memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adil, responsif, dan merata, di mana perempuan memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, D. R., Mauizah, A. Z., Heriansyah, D., Utomo, S., & Chodijah, S. (2021). Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 188–198. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>
- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesia*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Azizah, S. N., Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2024). Islam in World Perspectives Symposium. *Researchgate.Net*, 3(2), 248–259.
- Basri, H. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 51–66.
- Buchori, U., Iman, F., Ishom, M., & Al-Ayubi, S. (2023). Kesetaraan Gender Dan Hubungan M Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 112–123. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>
- Budianto, A. (2020). Kepemimpinan Perempuan Parlemen. 15, 2020.

- Hibbah, N., & Safitri, D. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender di Mandailing Natal. 2.
- Izzad, R. (2018). Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur. *Hermeneutik*, 12(2), 13. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6076>
- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904>
- Pulu, S., Subono, N. I., & Adelina, S. (2023). Dynamic and Challenges of Women Leaders: Gender Equality Agenda vs Gender Traditional Roles In Society. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 117–131.
- Trifena Revangelista Mambu. (2023). Gaya Kepemimpinan Perempuan Sebagai Pejabat Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. *Journal Publicuho*, 6(4), 1560–1569
- Zakiah, A. R. S. (2023). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah*, 1(2), 129. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>